



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOTA DINAS

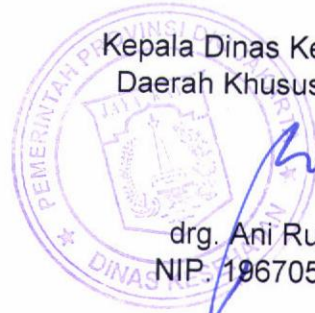
Kepada : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
Nomor : e-0097/HK.00.00
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lampiran
Hal : Penyampaian Usulan Program Pembentukan Peraturan Gubernur
(PERGUB) Tahun 2024

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0019 Tahun 2023 tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan usulan Peraturan Gubernur (PERGUB) Tahun 2024. (terlampir)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Jakarta, 4 Desember 2023

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



drg. Ani Ruspitawati, MM
NIP. 196705081992122001

Lampiran: Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
DKI Jakarta

Nomor : e-0097/HK.00.00

Tanggal : 4 Desember 2023

**USULAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA**

No	Judul Ranpergub	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
		Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
1	Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit			√		1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kewajiban Pemberian Layanan Kesehatan untuk Memberikan Informasi atas Adanya Dugaan Kekerasan terhadap Anak 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual	Triwulan III
2	Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah			√		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.	Triwulan III

3	Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan RSUD dan RSKD	✓	✓	Tersusunnya pedoman standar tarif pelayanan RSUD dan RSKD yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan dan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sesuai dengan Peraturan Gubernur.	Triwulan IV
4	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C dan Kelas D	✓	✓	Tersusunnya pedoman standar tarif pelayanan RSUD dan RSKD yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan dan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sesuai dengan Peraturan Gubernur.	Triwulan IV
5	Tarif Layanan Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah	✓	✓	Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (atribusi)	Triwulan I
6	Standar Pelayanan Minimal pada UPT Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah	✓	✓	Keputusan Gubernur Nomor 626 Tahun 2021 tentang Penetapan Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah sebagai BLUD	Triwulan I
7	Penyelenggaraan Posyandu	✓	✓	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun Lembaga Adat Desa, Kelembagaan Posyandu yang bergeser menyebabkan tugas dan fungsi Posyandu serta Lintas Sektor juga perlu disesuaikan.	Triwulan IV
8	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2017 tentang Penataan Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Kefarmasian	✓	✓	Kewenangan daerah provinsi untuk menyesuaikan kebijakan terbaru sesuai pada Peraturan Menteri Kesehatan No 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.	Triwulan IV
9	Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Jakarta Nomor 209 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Ambulans Gawat Darurat	✓	✓	Karena adanya perubahan SOTK Dinas Kesehatan pada Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	Triwulan II
10	Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin	✓	✓	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.	Triwulan IV
11	Tata Cara Pemberian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi bagi Restoran/Rumah Makan/Jasaboga diubah menjadi Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Sertifikat Laik Sehat (SLS)	✓	✓	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Triwulan II

12	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat					Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.	Triwulan IV
13	Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan (PRT) dan Cabang Distribusi Alat Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta	√			√	Perintah Undang-undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Bab XVIII.	Triwulan IV
14	Remunerasi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah	√				Penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah	Triwulan II
15	Pengendalian Penyakit HIV AIDS	√				Untuk mengakselerasi pengendalian HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta	Triwulan IV
16	Penilaian Kinerja Pelayanan BLUD	√				Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Aspek Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	Triwulan III

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



drg. Ani Ruspitawati, MM
NIP. 196705081992122001